LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN SEPTEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 10 Oktober 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 70,46 %

b. Keuangan = 13.035.795.956 (62,64%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.990.000			14.314.000		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.990.000	84,74	71,60	14.314.000	(13,14)	Menyesuaikan kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.862.000			5.963.000		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.862.000	68,87	63,56	5.963.000	(5,31)	Menyesuaiakan kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.233.000			25.753.870		

1	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	67.233.000	47,93	38,30	25.753.870	(9,63)	menyesuaikan kebutuhan (jumlah tamu)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			22.511.500		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	70,98	63,77	22.511.500	(7,21)	menyesuaikan kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.379.000			49.900.000		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.379.000	100	60,30	49.900.000	(39,70)	Rehab bangunan kantor masih dalam tahap persiapan. RKO Perubahan belum menyesuaikan perubahan (belum narik ke e-controlling)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.550.000			33.505.000		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.550.000	69,34	43,19	33.505.000	(26,15)	RKO Perubahan belum menyesuaikan perubahan (belum narik ke e-controlling)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	89.590.000			59.938.348		
1	Persiapan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	1.763.000	88,11	64,37	813.000	(23,74)	dokumen data gender di realisasi tw iv
2	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	87.827.000	59,76	51,01	59.125.348	(8,75)	dokumen data gender di realisasi tw iv
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5.470.000			715.000		
1	Konsultasi PUG	5.470.000	36,56	13,07	715.000	(23,49)	perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	230.548.000			157.619.000		
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	230.548.000	71,70	68,40	157.619.000	(3,30)	kegiatan dikpol menyesuaikan jadwal Dewan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	252.807.000			145.800.500		
1	Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	252.807.000	67,94	58,21	145.800.500	(9,73)	kegiatan Capacity Building mundur, menyesuaikan jadwal pimpinan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	17.026.000			8.212.500		
1	Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	17.026.000	78,30	51,24	8.212.500	(27,06)	belanja honor belum terserap sepenuhnya karena menyesuaikan narsum
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	5.850.000			0		
1	Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA	5.850.000	64,10	0	0	(64,10)	menunggu skor KLA dari pusat
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.050.000			0		
1	Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	2.050.000	100	0	0	(100)	Akan dilakukan kerjasama dengan mitra pada TW IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan danÃ Anak							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000			0		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	13,84	0	0	(13,84)	Ada kesalahan input target
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.105.000			1.400.000		
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.105.000	79,76	13,84	1.400.000	(65,92)	Akan ada perubahan target
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	16	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Juknis untuk pemantauan dan evaluasi stunting dari pusat belum terbit (KIE);
2. Hasil Survey SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) baru rilis di bulan Juni dan masih ada 6 kab/kota yang datanya masih kosong (KIE).
3. Penyusunan RAD KLA masih dalam proses penyelesaian batang tubuh (berisi pasal-pasal) dan lampiran pembagian tugas OPD terkait (PA)

Upaya

1. Koordinasi dengan TPPS Pusat, Provinsi dan kab/kota terkait juknis dan hasil survey SSGI (KIE).
2. Koordinasi intens dengan Tim Penyusun RAD KLA (PA)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan di 35 kab/kota (PP);
2. Capacity Building (DWP) (PP);
3. Daya Kartini (BKOW) (PP);
4. Pelatihan Anggaran dan Pelaporan Kegiatan (BKOW) (PP);
5. Pelaksanaan Pelatihan Kader PATBM rencana di Desa Dampingan, Kab. Pekalongan (PA);
6. Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK (Zoom) (PA);
7. Penguatan Peran Forum Genre Kecamatan melalui Kelompok PIK Remaja dalam Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi, Perencanaan Kehidupan Berkeluarga, dan Keterampilan Hidup by Zoom (KS);
8. FGD Penyelenggaraan Kegiatan Tribina dan UPPKA di Jawa Tengah (KS);
9. Pengembangan UMKM Perempuan Berdaya Melalui Program Inkubasi di Kota Smg, Surakarta, Salatiga, Kab. Jepara dan Kab. Sukoharjo (KG);
10. Dikpol rencana 3 titik (KG);
11. Rakor KLA di Semarang (PHA);
12. Safari Pelayan KB rencana 2 titik (Klaten dan kab. semarang) (KB);
13. Peningkatan Kader KB dalam Mendukung Program Bangga Kencana di Kab. Semarang (KB);
14. Monitoring TPPS di kab/kota rencana di 7 kab/kota(KIE);

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Semua kegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas Gubernur baru

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan September 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 10 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum

NIP. 196605171990082001